

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)**

Eva Lia Elita Novitasari¹⁾, Nasrizal²⁾, Riska Natariasari²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: evaliaelita@yahoo.co.id

*The Influence Of The Government Internal Control System, The Human Resources
Competencies, The Utilization Of Information Technology And The Application
Of Regional Financial Accounting System To The Quality Of Local
Government Financial Report
(Study In The Opd Of Rokan Hilir Regency)*

ABSTRACT

The sample in this study was determined by using purposive sampling method in total there are 27 OPD in Rokan Hilir Regency. The analytical method used in this research is multiple regression analysis using SPSS v22. The purpose of this study was to test the competence effect of Of The Government Internal Control System, The Human Resources Competencies, The Utilization Of Information Technology And The Application Of Regional Financial Accounting System To The Quality Of Local Government Financial Report. Respondents in this study is the structural officials involved in drafting the budget. The results showed that: 1) Effect of The Government Internal Control System affect the quality of financial reports with significant value 0,015 <0,05. 2) The Human Resources Competencies significantly influence the quality of financial reports with significant value 0,004 <0,05. 3) the utilization of Information Technology significantly influence the quality of financial reports with significant value 0,000 <0,05 .4) The Application Of Regional Financial Accounting System a significant effect on the quality of financial reports with significant value 0.000 <0.05.

Keyword : quality of financial reporting, governmet internal control system, human resources competency, technology information, regional financial accounting system

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk

memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur berupa laporan keuangan (DPR, 2003). Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Menurut Mursyidi (2013:47) kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun menurut Sofyan Safri Harahap (2009:146) kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai dan pembaca laporan. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah yang harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, menurut Mursyidi (2013:47) keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki : (1) Dimensi Relevan yaitu : Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Memiliki manfaat prediktif (predictive value), Tepat waktu dan Lengkap.(2) Dimensi Andal yaitu : Penyajian jujur, Dapat diverifikasi (verifiability), dan Netralitas.(3) Dimensi dapat dibandingkan. (4) Dimensi dapat dipahami.

Berdasarkan IHPS I 2018, opini dari tahun 2013-2017 terjadi pada seluruh tingkat pemda mengalami kenaikan. Pada pemerintah provinsi, capaian opini WTP bertambah dari 31 LKPD (91%) menjadi 33 LKPD (97%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 LKPD (72%), dan pada pemerintah kota dari 72 LKPD (77%) menjadi 80 LKPD (86%). Kenaikan

opini dari WDP menjadi WTP pada 45 LKPD dan dari TMP menjadi WDP pada 7 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Walaupun opini WTP terus mengalami peningkatan di pemerintahan, masih cukup banyak daerah yang opini laporannya belum WTP, melainkan WDP. Salah satu daerah yang laporannya masih memperoleh opini WDP adalah Kabupaten Rokan Hilir. Jika merujuk pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, saat ini opini audit dari BPK untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013 s.d 2017

No	Tahun	Opini
1	2013	WDP
2	2014	WDP
3	2015	WDP
4	2016	WDP
5	2017	WDP

Sumber : *BPK RI IHPS Semester I, 2018*

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan beberapa pemerintah daerah masih belum maksimal dalam memenuhi karakteristik kualitatif yang diisyaratkan, salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Menurut Waygandt et al; (2009:315) “jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010:20).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Mardiasmo (2009:146) sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu dan lebih berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moeheriono,2012:5).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Menurut Jogiyanto (2011:147) sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem teknologi informasi secara keuangan sangat signifikan sehingga informasi keuangan yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku sikap akuntan

menggunakan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (Abdul Halim,2014:35).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian As Syifa Nurillah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan metode analisis data. Penelitian ini saya lakukan kembali karena terdapat perbedaan penggunaan metode analisis data dan bermaksud untuk melihat apakah dengan penggunaan metode analisis data yang berbeda akan tetap diperoleh konsistensi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1.Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2.Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3.Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 4.Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memberikan bukti dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk memberikan bukti dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk memberikan bukti dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

A. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak OPD dalam mengembangkan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

B. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi

pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

C. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:6) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas dan kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent.

Stewardship Theory

Donaldson et al; (1989) dalam Anton (2010) mendefinisikan *Stewardship Theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. *Stewardship theory* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Goal Setting Theory

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* awalnya

dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan, akan berpengaruh pada perilaku kerja (Arfan,2010:90). Teori ini menemukan bahwa tujuan spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas lebih baik dari tujuan yang mudah. *Goal setting theory* didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran (ide-ide akan masa depan; keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam bertindak.

Kualitas Laporan Keuangan

Sofyan Safri Harahap (2009:146) menyatakan kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai dan pembaca laporan. Romney,et.all; (2008:14), menyatakan bahwa indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mulyadi (2010:163) sistem pengendalian intern itu sendiri adalah Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sementara Definisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010:20).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2012:324) kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung dengan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moeheriono,2012:5).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Abdul Kadir (2013:2) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009:17) yaitu “untuk memecahkan masalah, membuka kreatifitas dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan”.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima

secara umum (Abdul Halim,2014:35). Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri sendiri berbeda dengan akuntansi komersil.

Hubungan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Waygandt et all; (2009:315) jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmaningrum (2012), Nurillah (2014) dan Untary (2015) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H1: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Mardiasmo (2009:146) sumber daya manusia yang berkualitas

juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu dan lebih berkualitas.

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sukmaningrum (2012) bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kompetensi informasi laporan keuangan.

H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Jogyanto (2011:147) sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem teknologi informasi secara keuangan sangat signifikan sehingga informasi keuangan yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi yang baik.

Indriasari (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memepengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nurillah (2014) di pemerintahan Kota Depok bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, dan akan lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:27).

Penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

H4 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Ibu Kotanya terletak di Bagansiapi-api. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2018 sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah adalah sebanyak 27 OPD. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Dari kriteria tersebut akan diambil 3 responden yaitu kasubag, bendahara dan staf akuntansi sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 81 responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai dan pembaca laporan (Sofyan Safri Harahap, 2009:146). Adapun indikator yang digunakan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) yaitu : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat Dibandingkan, (4) Dapat Dipahami Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang

dikembangkan oleh Debby Nadya Edlin (2018). Masing-masing indikator diukur dengan model skala Ordinal lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Variabel Independen

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010:20). Adapun Indikator yang digunakan merupakan Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) diantaranya: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Debby Nadya Edlin (2018). Masing-masing indikator diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. (Moeheriono, 2012:5). Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diadopsi dari penelitian Milion Ginting (2016) diukur dengan tiga indikator : (1) Tanggungjawab, (2) Pelatihan, (3) Pengalaman. Masing-

masing indikator diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator yaitu :(1) Sistem akuntansi sesuai SAP , (2) Jaringan internet ,(3) Jaringan internet termanfaatkan dengan baik ,(4) Aplikasi yang digunakan ,(5) Laporan keuangan terkomputerisasi ,(6) Software sesuai dengan UU . Masing-masing indikator diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014:35) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu :(1) Kesesuaian sistem dengan SAP ,(2) Pengidentifikasian transaksi ,(3) Pencatatan transaksi ,(4) Bukti disetiap transaksi ,(5) Pencatatan kronologis ,(6) Pengklasifikasian transaksi ,(7) Laporan keuangan setiap periode ,(8) Pelaporan yang konsisten

dan periodik. Masing-masing indikator diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014).

Metode Analisis Data

peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	75	33	55	47,29	5,002
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	75	42	59	49,09	3,919
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	75	21	35	29,88	2,775
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	75	18	30	25,97	2,927
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4)	75	24	40	33,20	3,705
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Olahan, 2019

Nilai rata-rata kelima variabel tersebut lebih besar dari pada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai

koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total coreelation*, suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bila r hitung $>$ r tabel, maka dinyatakan valid
- 2) Bila r hitung $<$ r tabel, maka dinyatakan tidak valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,227. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 2
Uji Reliabilitas Data

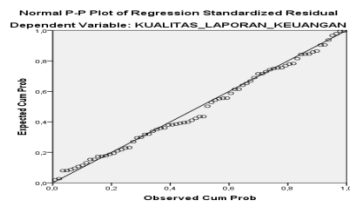
Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Kesimpulan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,934	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	0,761	0,7	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,815	0,7	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,904	0,7	Reliabel
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4)	0,883	0,7	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2019

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 1



Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan gambar di atas, terlihat data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Jadi, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,659	1,517	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	,414	2,418	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	,379	2,637	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	,537	1,864	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas <10 dan Tolerance >0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2



Sumber : Data Olahan, 2019

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8,596	3,352		-2,564	,012
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,175	,070	,137	2,495	,015
	,372	,125	,206	2,971	,004
	,922	,124	,539	7,431	,000
	,368	,082	,273	4,465	,000

a. dependent variabel : kualitas laporan keuangan

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = -8,596 + 0,175X_1 + 0,372X_2 + 0,922X_3 + 0,368X_4 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta -8,596 menunjukkan bahwa jika variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diabaikan, maka kualitas laporan keuangan bernilai -8,596.

b. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) sebesar 0,175 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah (Y) meningkat sebesar 0,175.

c. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,372 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) meningkat sebesar 0,372.

d. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah 0,922 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) meningkat sebesar 0,922.

e. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) adalah 0,368 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) meningkat sebesar 0,368.

Pengujian Hipotesis Hasil Uji t

Tabel 5

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
X ₁ → Y	0,175	2,495	1,99	0,015	Diterima
X ₂ → Y	0,372	2,971	1,99	0,004	Diterima
X ₃ → Y	0,922	7,431	1,99	0,000	Diterima
X ₄ → Y	0,368	4,465	1,99	0,000	Diterima

Sumber : Data Olahan, 2019

PEMBAHASAN

1) Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,495 dengan signifikansi 0,015 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n-k-1 : \alpha/2 = 75 - 4 - 1 : 0,05/2 = 70 : 0,025 = 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan.

Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (2,495) > t_{tabel} (1,99) dan sig (0,015) < 0,05. Jadi dapat dikatakan **H_{a1} diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Hasil penelitian tentang pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan As Syifa Nurillah (2014) hasil penelitian menunjukkan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,971 dengan signifikansi 0,004 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n-k-1 : \alpha/2 = 75 - 4 - 1 : 0,05/2 = 70 : 0,025 = 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (2,971) > t_{tabel} (1,99) dan sig (0,004) < 0,05. Jadi dapat dikatakan **H_{a2} diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:146) sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik, sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu dan lebih berkualitas. Hasil penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan As Syifa Nurillah (2014) hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,431 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n-k-1 : \alpha/2 = 75 - 4 - 1 : 0,05/2 = 70 : 0,025 = 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (7,431) > t_{tabel} (1,99)$ dan $sig (0,000) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_{a3} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Jogiyanto (2011:147) sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem teknologi informasi secara keuangan sangat signifikan sehingga informasi keuangan yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi yang baik. Hasil penelitian tentang pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan As Syifa Nurillah (2014) hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4) Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,465 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n-k-1 : \alpha/2 = 75 - 4 - 1 : 0,05/2 = 70 : 0,025 = 1,99$ dimana

n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (4,465) > t_{tabel} (1,99)$ dan $sig (0,000) < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_{a4} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, dan akan lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:27). Hasil penelitian tentang pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan As Syifa Nurillah (2014) hasil penelitian menunjukkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,927 ^a	,860	,852	1,924

a. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,860. Artinya adalah bahwa 0,860 atau 86% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Sedangkan sisanya 14%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, maka proses penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan struktur, metode, kebijakan yang ditetapkan serta selalu dilakukan pemantauan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan dengan adanya sumber daya yang berkompeten, maka dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu dan lebih berkualitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama dapat menambahkan variabel lain,

seperti dukungan pemimpin, peran internal audit dan lain sebagainya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi mengenai laporan keuangan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Kadir, 2013, *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta
- Anton, F.X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika, 1(2).
- Arfan Ikhsan Lubis, 2010, *Akuntansi Keprilakuan* . Edisi II. Salemba Empat Jakarta.
- DPR. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003. Tentang Pemerintah Daerah.
- Edlin, Debby Nadya. 2018. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)*. Skripsi : Universitas Riau
- Hamzah. 2009. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Jogiyanto, HM. 2011. *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan*

- Terstruktur, Teori, dan Aplikasi Bisnis, Edisi Ketiga.* Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta: Andi.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mursyidi. 2013. *Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro : Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP nomor 71 Tahun 2010.
- Romney, B.Marshall, 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*, Terjemahan Tim Penerjemah Salemba Empat, Edisi 9, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sofyan Syafri Harahap, (2009) . *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*: Jakarta : Rajawali Pers
- Sutarman. 2009. *Pengantar teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Weygandt, J.J, et al. (2009). *Accounting Principles*. Wiscosin : Wiley
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers